

## Dampak Demokrasi terhadap Kesejahteraan (Studi Kasus di Indonesia)

Azhar Abbas<sup>1</sup>, Timbul Dompok<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Putera Batam, Jalan R. Soeprapto, Muka Kuning, Batam 29439, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Putera Batam, Jalan R. Soeprapto, Muka Kuning, Batam 29439, Indonesia

### INFORMASI ARTIKEL

#### Sejarah Artikel:

Diterima Redaksi: 25 Juli 2020

Revisi Akhir: 10 Agustus 2020

Diterbitkan Online: 22 Agustus 2020

### KATA KUNCI

*Demokrasi, Kesejahteraan*

### KORESPONDENSI

No HP: 0852 7875 0477

E-mail: azhar.abbas2102@gmail.com

### A B S T R A C T

Elections in Indonesia, have been held periodically since 1955, then in 1971 After that, elections are held every 5 years, starting in 1977, 1982, 1987, 1992, and 1997. The democratization process carried out with the Elections above, especially during the New Order have not been able to produce the expected democratic values. During the Reformation period, Indonesia had begun elections in 1999, then in 2004, 2009, 2014 and 2019. There is something interesting about the dynamics of the development of democracy in this country since the reformation began in 1998. One thing that stands out is the impact of democracy on people's welfare. In the midst of public space, various discussions emerged about whether democracy is still an appropriate system for answering the concept of a better state and being able to provide welfare for all the people of Indonesia. Through elections, voters can channel their chosen aspirations. The hope, of course, is choosing leaders who can realize programs that can improve people's welfare.

### 1. PENDAHULUAN

Orang-orang secara individual adalah elemen terkecil di suatu negara. Kelompok individu-individu ini membentuk sebuah komunitas, dan akhirnya entitas negara diciptakan yang bertujuan untuk mencapai kebaikan bersama (*zoon politicon*). Politik adalah realita yang tak dapat dielakkan dari kehidupan manusia. Hal ini terlihat dari kesalinghubungan (*interrelation*) antar manusia ketika manusia berusaha mencapai kesejahteraan bagi dirinya atau kelompoknya dengan sumberdaya yang dimiliki, dan ketika seseorang berupaya memengaruhi orang lain agar menerima pandangannya bahkan untuk menduduki jabatan tertentu. Untuk itu sebagai makhluk politik keberadaan manusia tidak terpisahkan dari konsep Negara. Manusia sebagai makhluk politik, tidak hanya mengejar politik sebagai pengetahuan, tetapi yang paling penting adalah tindakan. Kebijakan politik

untuk bertindak, serta bagaimana penguasa berpikir untuk membuat warga negara menjadi baik, kemajuan dan kesejahteraan dapat dicapai. Jadi itu bukan hanya penyempurnaan pikiran yang dicapai melalui politik, tetapi hasil dari tindakan yang diambil dari system politik.

Singkatnya, politik adalah tentang proses perumusan dan penerapan kebijakan publik. Sistem politik dan pemerintahan modern memunculkan ide demokrasi. Kisah demokrasi dimulai dengan orang-orang Yunani. "Sebagai sebuah konsep dan praktik, demokrasi berasal dari masyarakat Yunani klasik dan berlangsung hingga akhir periode Arkaik. Munculnya demokrasi pada waktu itu disebabkan oleh kelelahan masyarakat terhadap sistem yang berlaku pada waktu itu yang selalu berjuang untuk berubah. Dimulai dari gerakan sosial yang melibatkan rakyat didalam menentukan kebijakan pemerintahan, system demokrasi mulai berkembang. (Kurniawan, 2015)

Secara bahasa, demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Kata demokrasi terbentuk dari kata *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos* yang memiliki arti kekuasaan atau kekuatan. Jadi, pengertian demokrasi setara artinya dengan kekuasaan rakyat. Kekuatan itu melingkupi sector sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Demokrasi adalah berupa pemerintahan dari rakyat dan juga untuk rakyat. Disini, berbagai wakil rakyat yang telah dipilih adalah sebagai pelaksana kekuasaan Negara, yang mana rakyat sudah mempunyai keyakinan bahwa semua keinginan serta kepentingan rakyat selalu di perhatikan untuk melaksanakan pemerintahan tersebut.

Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan Negara. Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Demokrasi lahir dari evolusi pemikiran politik Barat yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Perwujudan nyata demokrasi dalam praktek bernegara masa kini (modern) adalah dengan melaksanakan Pemilihan umum. Pemilihan Umum menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatan atas negara dan pemerintahan. Pernyataan kedaulatan rakyat tersebut diwujudkan dalam proses pelibatan masyarakat untuk menentukan siapa-siapa yang harus menjalankan pemerintahan (*representative government*) dimana rakyat menduduki tahta tertinggi sebagai pengawas pemerintahan.

Pemilu di Indonesia, telah dilaksanakan secara periodic sejak tahun 1955. Pemilu tahun 1955 merupakan pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Waktu itu Republik Indonesia berusia 10 tahun. Pemilihan Umum yang diadakan sebanyak dua kali yaitu pertama pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan kedua pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Setelah pemilu pertama tahun 1955, Indonesia baru melakukan pemilu kembali pada tanggal 5 Juli 1971, pertama di jaman Orde Baru. Pada pemilu kali ini, terdapat 9 partai politik dan 1 organisasi masyarakat yang berpartisipasi. Selanjutnya Pemilu dilakukan setiap 5 tahun sekali, mulai tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 dengan 3 peserta yaitu Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Partai Pembangunan Persatuan (PPP). Peserta

pemilu kali ini lebih sedikit dibanding pemilu sebelumnya. Ini terjadi setelah sebelumnya pemerintah bersama-sama dengan DPR berusaha menyederhanakan jumlah partai dengan membuat UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar. Kedua partai itu adalah Partai Persatuan Pembangunan atau PPP dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI dan satu Golongan Karya atau Golkar.

Proses demokratisasi yang dilakukan dengan Pemilu diatas, terlebih pada masa Orde Baru belum mampu menghasilkan nilai-nilai demokrasi yang diharapkan. Setelah Reformasi, Indonesia telah memulai Pemilu tahun 1999, tetapi format multi partai ini juga belum ideal untuk dilaksanakan. Sebuah format baru dalam Pemilu dimulai sejak Pemilu 2004, dengan sistem yang lebih terbuka dan terlaksananya Pemilihan Presiden secara langsung. Terakhir, yang baru saja kita lalui Bersama adalah Pemilu Serentak 17 April 2019, dengan memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Tahapan demokrasi bangsa Indonesia, tidak hanya di tingkat Pemerintah Pusat, DPR dan DPD, tetapi di tingkat daerah juga mulai dilangsungkan sejak tahun 2005 dengan melakukan Pemilihan langsung Kepala Daerah. Sesungguhnya Pilkada dapat juga dijadikan sebagai proses penguatan demokratisasi.

Menurut Ketua Asosiasi Konsultan Politik Asia Pasifik (APAPC), Pri Sulisto, keberhasilan Indonesia dalam bidang demokrasi bias menjadi contoh bagi negara-negara di kawasan Asia yang hingga saat ini beberapa di antaranya masih diperintah dengan ‘tangan besi’. Indonesia juga bias menjadi contoh, bahwa pembangunan system demokrasi dapat berjalan seiring dengan upaya pembangunan ekonomi. Keberhasilan Indonesia dalam demokrasi, yang tidak banyak disadari, membuat orang luar, termasuk Asosiasi Internasional Konsultan Politik (IAPC), membuka mata rakyat Indonesia bahwa keberhasilan semacam itu adalah pencapaian luar biasa. Prestasi ini juga menjadikan Indonesia potensi besar untuk meluncurkan era baru di Asia yang demokratis dan makmur. (Nihaya, M, 2011)

Ada yang menarik dari dinamika perkembangan demokrasi di negeri ini sejak reformasi bergulir 1998 lalu. Satu hal yang menonjol adalah dampak demokrasi terhadap kesejahteraan rakyat. Ditengah ruang publik, muncul berbagai diskusi tentang apakah demokrasi memang masih merupakan sistem yang sesuai untuk menjawab konsep bernegara yang

lebih baik dan mampu member kesejahteraan bagi segenap rakyat Indonesia. Hendaknya melalui Pemilu, masyarakat pemilih dapat menyalurkan aspirasi pilihannya. Harapannya, tentu memilih para pemimpin yang dapat mewujudkan program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemimpin yang dapat dapat mewujudkan harapan besar bagi rakyat Indonesia adalah dengan terwujudnya kesejahteraan dari proses demokratisasi yang berlangsung.

Menurut Heru Nugroho, Bangsa Indonesia yang masih dalam taraf belajar berdemokrasi harus selalu belajar dan melakukan pembenahan di segala bidang. Kelemahan yang terjadi selama satu dekade proses reformasi digulirkan sebaiknya terus dikoreksi dan diperbaiki. Dengan cara ini maka praktek demokrasi untuk kesejahteraan rakyat dapat direalisasi dan kegagalan demokrasi dapat dihindari. (Nugroho, 2012). Atas dasar pemikiran diatas, maka peneliti mengangkat judul penelitian yang akan dilakukan, yaitu: **“Dampak Demokrasi terhadap Kesejahteraan (Studi Kasus di Indonesia)”**.

Dengan melihat pada permasalahan yang diuraikan tersebut, maka peneliti merumuskan permasalahan dengan Bagaimanakah dampak demokrasi terhadap kesejahteraan?

#### Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nanik Prasetyoningsih (Prasetyoningsih, 2014) dengan judul Dampak Pemilihan Umum Serentak bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia yang dimuat pada Jurnal Media Hukum. Vol. 21 No.2 Desember 2014. Kualitas demokrasi tergantung kepada keadilan Bukan kepada biaya yang dihabiskan. Hal ini penting untuk memastikan keadilan dan pada waktu yang bersamaan juga menghindari terjadinya konflik yang mungkin terjadi
2. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Budi Purwanto, Mochamad Syawie (Purwanto & Syawie, 2012) dengan judul Demokrasi dan Kesejahteraan yang dimuat pada jurnal Informasi, Vol. 17, No. 01 Tahun 2012 Negara kesejahteraan itu hanya akan muncul di negara-negara yang perekonomiannya sudah mapan dan makmur, jadi di sini GDP per kapita dianggap menentukan kualitas maupun konfigurasi kebijakan suatu Negara
3. Penelitian yang dilakukan oleh Jessica Martha, Arry Bainus, Dudi Heryadi (Martha, Bainus, & Heryadi, 2014) dengan judul Demokrasi dan Kesejahteraan yang dimuat pada jurnal Informasi, Vol. 17, No. 01 Tahun 2012. Negara kesejahteraan itu hanya akan muncul di
4. Penelitian yang dilakukan oleh Heru Nugroho (Nugroho, 2012) dengan judul Demokrasi dan Demokratisasi Sebuah Kerangka Konseptual untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia yang dimuat pada jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 1 No.1, Mei 2012 Hasil menunjukkan bahwa demokratisasi di Indonesia masih dalam taraf belajar dan perlu pembenahan serta terus dikoreksi, agar praktek demokrasi dapat mewujudkan kesejahteraan..
5. Penelitian yang dilakukan oleh Klaus Gründler, Tommy Krieger (Gründler & Krieger, 2016) dengan judul Democracy and growth: Evidence from a machine learning indicator yang dimuat pada jurnal European Journal of Political Economy 45 (2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur demokrasi memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### Demokrasi

Demokrasi didefinisikan dari kata atau terminologi, yaitu "orang yang berkuasa" atau "pemerintahan rakyat" (*government of rule by the people*). Di Yunani kuno, demokrasi berasal dari dua suku kata, yaitu demos, yang berarti "orang" atau 'rakyat' dan kratos, yang berarti "kekuatan atau kekuasaan". Demokrasi ada ketika para pengambil keputusan kolektif terkuat dalam suatu sistem dipilih melalui pemilihan yang adil, jujur dan berkala, dan dalam sistem ini, para kandidat bebas untuk bersaing memperebutkan suara dan hampir semua penduduk dewasa dapat memilih. Demokrasi dirancang untuk mempromosikan partisipasi rakyat, bukan partisipasi siapa pun atau kelompok. Peran rakyat (baca: publik) lebih dihargai karena memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan umum. Sebut saja, untuk menentukan kepala daerah, bupati, gubernur dan presiden sebagai kepala negara dalam sistem demokrasi, rakyat harus memilihnya. (Jailani, 2015).

### Model Demokrasi

Menurut Inu Kencana ada dua model demokrasi jika dilihat dari segi pelaksanaan, yaitu demokrasi langsung (*direct democracy*) dan demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Demokrasi langsung terjadi bila rakyat mewujudkan kedaulatannya pada suatu negara dilakukan secara langsung, artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Pada demokrasi langsung lembaga legislatif hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas jalannya pemerintahan, sedangkan pemilihan pejabat eksekutif (presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, dan walikota) dilakukan rakyat secara langsung. Begitu juga pemilihan anggota parlemen atau legislatif (DPR, DPD, DPRD) dilakukan rakyat secara langsung. Demokrasi tidak langsung terjadi bila untuk mewujudkan kedaulatannya rakyat tidak secara langsung berhadapan dengan pihak eksekutif, melainkan melalui lembaga perwakilan. Pada demokrasi tidak langsung, lembaga parlemen dituntut kepekaannya terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dalam hubungannya dengan pemerintah atau negara. Demokrasi tidak langsung disebut juga dengan demokrasi perwakilan.

### **Kesejahteraan**

Kesejahteraan dapat dilihat dari 2 sisi, kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan individu adalah suatu cara mengaitkan kesejahteraan dengan pilihan-pilihan obyektif untuk kehidupan pribadinya. Sedangkan kesejahteraan sosial merupakan cara mengaitkan kesejahteraan dengan pilihan sosial secara obyektif yang diperoleh dengan cara menjumlahkan kepuasan seluruh individu dalam masyarakat. (Badrudin, 2012). Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke *keadaan yang baik*, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial.

### **3. METODOLOGI**

Dalam melaksanakan suatu penelitian, para peneliti membutuhkan sebuah metode (desain penelitian) dalam hal menggunakan penelitian dan atau kualitatif tentunya penelitian tersebut yang akan menyesuaikan kebutuhan suatu penelitian. Sehubungan hal tersebut, peneliti menggunakan desain dengan metode kualitatif.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Konsep Demokrasi**

Konsep demokrasi sebenarnya identik dengan konsep kedaulatan rakyat, dalam hal ini rakyat merupakan sumber dari kekuasaan suatu negara. Sehingga tujuan utama dari demokrasi adalah untuk memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada rakyat. Jika ada pelaksanaan suatu demokrasi yang ternyata merugikan rakyat banyak, tetapi hanya menguntungkan untuk orang-orang tertentu saja, maka hal tersebut sebenarnya merupakan pelaksanaan dari demokrasi yang salah arah. Kedaulatan rakyat dalam suatu sistem demokrasi tercermin dari ungkapan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*government of the people, by the people for the people*). (Munir, 2010)

Berangkat dari pemaknaan yang sama dan karenanya universal, demokrasi substansial, telah memberikan daya pikat normatif. Bahwa dalam demokrasi, mestinya berkembang nilai kesetaraan (*egalitarian*), keragaman (*pluralisme*), penghormatan atas perbedaan (*toleransi*), kemanusiaan atau penghargaan atas hak-hak asasi manusia, “kebebasan”, tanggung jawab, kebersamaan dan sebagainya. Secara substansif demokrasi melampaui maknanya secara politis. (Huda, 2010)

#### **Prinsip Demokrasi**

Suatu pemerintahan dinilai demokratis apabila dalam mekanisme pemerintahannya diwujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip tersebut berlaku universal. Maksudnya adalah keberhasilan suatu negara dalam menerapkan demokrasi dapat diukur berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Tolok ukur tersebut juga dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan demokrasi di negara lainnya. Menurut Inu Kencana Syafii (Syafii, 2013), prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal antara lain:

a. Adanya pembagian kekuasaan

Distribusi kekuasaan di suatu negara berdasarkan prinsip demokrasi dapat merujuk pada pernyataan John Locke tentang trias politik. Kekuasaan negara dibagi menjadi tiga bagian, yaitu cabang eksekutif, legislatif dan hukum. Tiga institusi memiliki kesamaan sehingga mereka tidak dapat saling menguasai.

b. Pemilihan umum yang bebas

Kedaulatan tertinggi di negara demokratis ada di tangan rakyat. Tetapi tentu saja, kedaulatan ini tidak dapat dilakukan secara langsung oleh setiap orang. Kedaulatan ini adalah keinginan semua orang melalui perwakilan rakyat di lembaga legislatif. Untuk menentukan perwakilan rakyat, pemilihan umum diadakan. Dalam implementasinya, setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memilih perwakilan yang diinginkan. Tidak ada pembenaran untuk pemilihan di negara demokratis. Selain memilih wakil rakyat, ada juga pemilihan umum untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Rakyat memiliki kebebasan untuk memilih pemimpin negara.

c. Manajemen yang terbuka

Untuk mencegah terciptanya negara yang kaku dan otoriter, rakyat harus dilibatkan dalam penilaian pemerintah. Hal ini dapat terwujud jika pemerintah bertanggung jawab untuk mengimplementasikan pemerintahan, pengembangan dan layanan masyarakat di hadapan rakyat.

d. Kebebasan individu

Dalam demokrasi, negara harus menjamin kebebasan warga negara di berbagai bidang. Misalnya, kebebasan berekspresi, kebebasan bertindak dan sebagainya. Tetapi tentu saja, kebebasan ini harus dilakukan secara bertanggung jawab. Ingatlah bahwa kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Dengan demikian, masyarakat mana pun dapat menjalankan kebebasan yang dijamin oleh hukum dengan tidak merugikan kepentingan orang lain.

e. Peradilan yang bebas

Melalui distribusi kekuasaan, kehakiman memiliki kebebasan untuk menjalankan perannya. Lembaga ini tidak dapat dipengaruhi oleh lembaga negara lainnya. Dalam praktik negara, hukum berada di posisi tertinggi. Siapa pun yang bersalah atas hukum harus memperhitungkan kesalahan mereka.

f. Pengakuan hak minoritas

Setiap negara memiliki banyak orang. Keragaman ini dapat dilihat dari etnis, agama, ras dan kelas. Keanekaragaman di suatu negara menciptakan konsep kelompok mayoritas dan minoritas. Kedua kelompok memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara. Karena alasan ini, negara harus melindungi semua warga negara tanpa saling mendiskriminasi.

g. Pemerintahan yang berdasarkan hukum

Dalam kehidupan bernegara, hukum memiliki kedudukan tertinggi. Hukum menjadi instrumen untuk mengatur kehidupan negara. Dengan demikian negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.

h. Supremasi hukum

Penghormatan terhadap hukum harus diajukan oleh pemerintah dan rakyat. Tidak ada kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan atas nama hukum. Karena itu, pemerintah harus didasarkan pada undang-undang yang mendukung keadilan

i. Pers yang bebas

Dalam sebuah negara demokrasi, kehidupan dan kebebasan pers harus dijamin oleh negara. Pers harus bebas menyuarakan hati nuraninya terhadap pemerintah maupun diri seorang pejabat.

j. Beberapa partai politik

Partai politik menjadi wadah bagi warga negara untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memilih partai politik yang sesuai dengan hati nuraninya.

Dalam hal ini, demokrasi berarti melibatkan orang dalam membuat kebijakan sehingga mereka tidak sewenang-wenang sehingga mereka mempertimbangkan hak-hak masing-masing komunitas. Selain itu, kebijakan yang diambil dan dieksekusi juga akan kembali ke rakyat dan juga ke rakyat. Pemerintahan yang demokratis harus melindungi hak-hak setiap warga negara, seperti hak untuk mengekspresikan pendapat, pemikiran, hak untuk kebebasan, dan mengendalikan serta mengawasi pemerintah untuk tidak melakukan pelanggaran. Faktanya, banyak negara menggunakan prinsip demokrasi ini dengan membuat keputusan dengan suara mayoritas sehingga pemenangnya menjadi dewan legislatif. (Saputri & Prayogo, 2018).

### Indeks Demokrasi

Menurut Badan Pusat Statistik, Indeks Demokrasi merupakan ukuran capaian demokrasi, dimana tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).

### Kesejahteraan Sosial

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara.

Menurut Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Indeks/ HDI*) adalah rata-rata sederhana dari tiga indikator yang menggambarkan kemampuan dasar. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia.

### 5. SIMPULAN

Politik adalah realita yang tak dapat dielakkan dari kehidupan manusia. Hal ini terlihat dari kesalinghubungan (*interrelation*) antar manusia ketika manusia berusaha mencapai kesejahteraan bagi dirinya atau kelompoknya dengan sumberdaya yang dimiliki, dan ketika seseorang berupaya memengaruhi orang lain agar menerima pandangannya bahkan untuk menduduki jabatan tertentu. Untuk itu sebagai makhluk politik keberadaan manusia tidak terpisahkan dari konsep Negara. Pemilihan Umum menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatan atas negara dan pemerintahan. Pernyataan kedaulatan rakyat tersebut diwujudkan dalam proses pelibatan masyarakat untuk menentukan siapa-siapa yang

harus menjalankan pemerintahan (*representative government*).

Pemilu di Indonesia, telah dilaksanakan secara periodik sejak tahun 1955, kemudian tahun 1971 Setelah itu, pemilu dilakukan setiap 5 tahun sekali, mulai tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Proses demokratisasi yang dilakukan dengan Pemilu diatas, terlebih pada masa Orde Baru belum mampu menghasilkan nilai-nilai demokrasi yang diharapkan. Pada masa Reformasi, Indonesia telah memulai Pemilu tahun 1999, lalu tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019.

Satu hal yang menonjol adalah dampak demokrasi terhadap kesejahteraan rakyat. Ditengah ruang publik, muncul berbagai diskusi tentang apakah demokrasi memang masih merupakan sistem yang sesuai untuk menjawab konsep bernegara yang lebih baik dan mampu memberi kesejahteraan bagi segenap rakyat Indonesia. Hendaknya melalui Pemilu, masyarakat pemilih dapat menyalurkan aspirasi pilihannya. Harapannya, tentu memilih para pemimpin yang dapat mewujudkan program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Badrudin, R. (2012). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Gründler, K., & Krieger, T. (2016). Democracy and growth: Evidence from a machine learning indicator. *European Journal of Political Economy*, 45, 85–107. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2016.05.005>
- Huda, N. (2010). *Ilmu Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jailani. (2015). Sistem Demokrasi, Sudut Hukum, Ketatanegaraan. *Jurnal Inovatif*, VIII(I), 134–147.
- Kurniawan, G. (2015). *Kebebasan Sebagai Hakekat Demokrasi*. VIII(2).
- Martha, J., Bainus, A., & Heryadi, D. (2014). Pengaruh Pelaksanaan Demokrasi Terhadap Kesejahteraan: Teori Dan Realita (Studi Kasus: Indonesia). *Pengaruh Pelaksanaan Demokrasi Terhadap Kesejahteraan: Teori Dan Realita (Studi Kasus: Indonesia)*, 14. Retrieved from <http://www.ysps.am/index.php?id=52&m=18>
- Munir, F. (2010). *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung: Refika Aditama.

- Nihaya, M. H. (2011). Demokrasi dan Problematikanya di Indonesia. *Jurnal Sulesana*, 6(2), 15–25.
- Nugroho, H. (2012). Demokrasi Dan Demokratisasi : Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 1(1), 1–15.
- Prasetyoningsih, N. (2014). Dampak Pemilihan Umum Serentak bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 21(2), 241–263. Retrieved from <http://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1190/1251>
- Purba, Sivadabert, A. (2015). Potret Pandangan Akademisi Di Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UGM ( JSP ) Mengenai Permasalahan Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Politik Muda*, 4(1), 1–12.
- Purwanto, A. B., & Syawie, M. (2012). Demokrasi dan Kesejahteraan (Democracy and Welfare). *Informasi*, 17(01).
- Saputri, W. D., & Prayogo, B. E. (2018). *Tantangan Demokrasi di Era Globalisasi Demi Mewujudkan Pencegahan Politik Uang dalam Pemilu*.
- Syafiie, I. K. (2013). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.